



POTRET

SENSUS PENDUDUK MUSI BANYUASIN 2020



menunggu

**SATU DATA
KEPENDUDUKAN
INDONESIA**



POTRET

SENSUS PENDUDUK MUSI BANYUASIN 2020



MENUNGU

**SATU DATA
KEPENDUDUKAN
INDONESIA**

POTRET SENSUS PENDUDUK MUSI BANYUASIN 2020

ISBN: 978-623-677-13-8

Nomor Publikasi: 16060.2101

Katalog: 2102041.1606

Ukuran Buku: 18,2 x 25,7

Jumlah Halaman: vii + 24

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin

Desain Kover oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin

Penerbit :

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin

Pencetak :

CV. Vika Jaya

Sumber Ilustrasi :

google.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan dan atau menggandakan Sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab :

Sunita, SE, M.Si

Penyunting :

Heri Sigit Priyanto, S.ST

Penulis :

Teresia Naomi Anastasia, S.Tr.Stat

Pengolah Data :

BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Pembuat Infografis :

Teresia Naomi Anastasia, S.Tr.Stat

Puti Hera Lesmana, S.Tr.Stat





- **Perjalanan Sensus Penduduk 2020**
- **Sensus Penduduk Online Musi Banyuasin**
- **Penduduk Musi Banyuasin Hasil Sensus Penduduk 2020**
- **Lampiran**

1 Data yang valid merupakan **kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara** karena data yang akurat sangat penting untuk menyusun perencanaan yang benar. Data yang akurat sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Data yang akurat sangat penting untuk mengeksekusi program yang tepat sasaran

2 Kesimpangsiuran sejumlah data dari berbagai **Kementerian dan Lembaga menjadi salah satu penyebab** tidak optimalnya **pelaksanaan** kebijakan pemerintah.

3 **Kolaborasi** antarlembaga dan meninggalkan **ego sektoral**.

Presiden Joko Widodo

- Penganjangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara pada tanggal 24 Januari 2020
- Peresmian Pembukaan Rakortek SE2016 di Istana Negara, 2016
- Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019



KATA PENGANTAR

Indonesia adalah negara dengan potensi yang sangat besar. Dari sisi jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Dengan strategi yang tepat, penduduk dapat menjadi kekuatan bangsa untuk Indonesia Maju. Demi mewujudkan cita-cita Indonesia Maju, BPS berikhtiar menyelesaikan amanat untuk melaksanakan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dengan berbagai tantangan di tengah pandemi Covid-19. Atas seijin Tuhan Yang Maha Kuasa disertai dengan kerja keras seluruh pihak, pendataan lapangan SP2020 telah selesai dilaksanakan dengan berbagai penyesuaian tata kelola di setiap tahapannya dan tetap berpegang pada tujuan besar SP2020.

Booklet “Potret Sensus Penduduk Musi Banyuasin 2020” menyajikan agregat data dasar penduduk Musi Banyuasin sampai dengan level kecamatan. Cakupan data dasar dari angka hasil SP2020 adalah jumlah penduduk menurut jenis kelamin, wilayah administrasi, berikut parameter-parameter turunannya seperti kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, dan laju pertumbuhan penduduk. Data-data tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data penduduk terkini untuk keperluan perencanaan, monitoring, evaluasi program pembangunan serta berbagai referensi penelitian.

Booklet ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga booklet ini bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan banyak pihak untuk berbagai kepentingan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan pelaksanaan sensus penduduk di masa yang akan datang.

Musi Banyuasin, Januari 2021



SUNITA, S.E, M.Si



DAFTAR SINGKATAN

Bakohumas	: Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
CAPI	: <i>Computer Assisted Personal Interviewing</i>
CAWI	: <i>Computer Aided Web Interviewing</i>
Covid-19	: <i>Corona Virus Disease</i>
Ditjen Dikti	: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Ditjen Dukcapil	: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DOPU	: <i>Drop Off and Pick Up</i>
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendes	: Kementerian Desa
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
DP	: Daftar Penduduk
K/L	: Kementerian/Lembaga
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAPI	: <i>Paper and Pencil Interviewing</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNSD	: <i>United Nations Statistics Division</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
Perpres	: Peraturan Presiden Republik Indonesia
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SLS	: Satuan Lingkungan Setempat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UU	: Undang-undang
WAG	: <i>Whatsapp Group</i>
Wilkerstat	: Wilayah Kerja Statistik
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia

1

Perjalanan Sensus Penduduk 2020

SP2020, titik awal *roadmap* Satu Data
Kependudukan Indonesia.
#MencatatIndonesia

Masyarakat mengisi SP Online melalui website sensus.bps.go.id



#MENCATATINDONESIA



MENCATAT INDONESIA: Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia

Data penduduk merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini karena data penduduk digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan anggaran, parameter untuk menentukan kebijakan, dan eksekusi program pembangunan.

Namun data penduduk merupakan salah satu jenis data yang berpotensi untuk berbeda. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan referensi waktu, konsep-definisi, termasuk perbedaan metodologi pengumpulan data. Dalam hal ini Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi berbagai perbedaan tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia.

Dalam hal ini, SP2020 merupakan titik awal dalam *roadmap* mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia, melalui integrasi data administrasi kependudukan sebagai basis data pelaksanaan SP2020.



Tujuan Pelaksanaan SP2020

Melalui pendataan lengkap di tahun 2020, SP2020 bertujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju **"SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA"**.

Melalui pendataan sampel di tahun 2021, SP2020 bertujuan untuk mengumpulkan data-data terkait parameter demografi (kelahiran, migrasi, dan kematian), pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan, perumahan, dan informasi penting lainnya untuk kepentingan penghitungan proyeksi penduduk, evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan monitoring pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Gambaran Pelaksanaan SP2020

1. SP2020 bertujuan untuk mencatat Indonesia dengan menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan basis data Administrasi Kependudukan (Adminduk).
2. SP2020 mencatat WNI dan WNA yang telah tinggal di wilayah teritorial Indonesia minimal 1 tahun atau berniat untuk menetap di Indonesia minimal 1 tahun, termasuk perwakilan RI yang ada di luar negeri/ wilayah teritorial Indonesia beserta keluarganya.
3. Pencatatan penduduk dalam SP2020 dilaksanakan di wilayah penduduk biasanya bertempat tinggal berdasarkan konsep kependudukan dengan referensi waktu minimal 1 tahun.
4. SP2020 mencatat Indonesia dengan berbagai moda, yaitu *Computer Aided Web Interviewing* (CAWI) dalam SP Online, serta *Paper and Pencil Interviewing* (PAPI) dan *Drop Off and Pick Up* (DOPU) dalam SP September.
5. Periode pendataan penduduk adalah 15 Februari - 29 Mei 2020 (SP Online) dan September 2020 (pendataan lapangan) .



DASAR PENYELENGGARAAN

Penduduk adalah kekuatan sebuah negara. Jumlah penduduk digunakan sebagai dasar untuk semua kebijakan negara. Sehingga UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP No. 51 Tahun 1999 mengamanahkan Badan Pusat Statistik untuk menghitung kekuatan tersebut melalui sensus penduduk. Pencatatan penduduk juga diatur oleh UU No. 23 Tahun 2006 dan perubahannya pada UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta oleh UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan agar semua negara memiliki statistik kependudukan dan perumahan setidaknya sekali dalam periode 2015-2024. PBB juga menyarankan metode sensus bergeser dari metode tradisional (*full canvassing*) menuju ke *register based census*. Dalam perjalanannya menuju ke *fully register based census*, sensus penduduk dapat dilaksanakan dengan metode kombinasi dahulu yaitu mengkombinasikan data registrasi dengan data sensus. Keuntungan metode ini adalah meningkatkan keakuratan data; saling melengkapi kedua sumber data; memeriksa, memutakhirkan, dan meningkatkan kualitas kedua sumber data; menjadi bingkai penghubung untuk menyatukan berbagai sumber data.

Oleh karena itu, SP2020 dirancang dengan menggunakan data adminduk dari Ditjen Dukcapil sebagai data dasar. Hal ini juga dimaksudkan agar SP2020 menjadi *bridging* untuk mewujudkan Satu Kependudukan Indonesia.

Upaya mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia juga diperkuat oleh Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Perpres ini mengatur kebijakan tata kelola data pemerintah, termasuk data kependudukan. Data dikelola agar dapat dibagipakaikan antar- instansi pemerintah dengan memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Dengan demikian, setiap instansi pemerintah bekerja sama untuk membangun satu data yang terintegrasi secara utuh tentang Indonesia. Lebih lanjut, setiap instansi pemerintah akan menghasilkan data yang selaras.



UU No. 16 Tahun 1997
tentang Statistik
UU No. 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan
UU No. 52 Tahun 2009
Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga
UU No. 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas UU No. 23
Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan



**United Nations
Recommendation 2017**
Perpres No. 39 Tahun 2019



Satu Data Indonesia
Perpres No. 39 Tahun 2019



Statistik Hayati
Perpres No. 62 Tahun 2019

#MENCATATINDONESIA

Sinkronisasi data juga dilandasi oleh Perpres No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (AKSPH). Perpres ini bertujuan untuk percepatan pencatatan seluruh peristiwa penting kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan lain-lain. Sehingga setiap penduduk dapat memiliki dokumen kependudukan yang bersifat wajib, permanen, dan berkelanjutan. Pencatatan peristiwa tersebut dan hasil SP2020 merupakan sumber data untuk penghitungan Statistik Hayati.

Dalam hal ini, SP2020 menjadi sebuah titik awal dalam pengembangan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Sehingga SP2020 dapat menjadi bingkai penghubung untuk integrasi data dalam mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia.

METODE DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Berdasarkan dasar-dasar tersebut, SP2020 menggunakan metode kombinasi yang merupakan titik peralihan pelaksanaan sensus dari metode tradisional (mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah) menjadi sensus penduduk yang terintegrasi dengan data registrasi, yaitu data administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil.

Metode Pelaksanaan SP2020



#MENCATATINDONESIA

Tahapan Pelaksanaan SP2020



15 Feb – 29 Mei 2020

Penduduk melaksanakan sensus penduduk secara mandiri melalui: sensus.bps.go.id

Informasi keberadaan penduduk yang melakukan SP Online dimutakhirkan kembali pada September 2020



15 Feb – 29 Mei 2020

- Pemeriksaan daftar penduduk
- Verifikasi lapangan (*ground check*)
- Pendataan penduduk (DOPU, Non DOPU, Wawancara)

Pengumpulan data dan informasi kependudukan dan perumahan untuk menghasilkan berbagai parameter demografi dan indikator sosial lainnya.

2021 : PENCACAHAN SAMPEL



KONSEP DALAM SENSUS PENDUDUK 2020

Sebagai upaya untuk mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia, SP2020 menggunakan konsep penduduk, keluarga, dan wilayah kerja statistik yang diselaraskan dengan konsep yang digunakan pada data Adminduk Ditjen Dukcapil. Dasar penyelarasan konsep pada SP2020 mengacu pada Undang-undang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Rekomendasi PBB tentang Sensus Penduduk dan Perumahan.

1

KONSEP PENDUDUK

Pada sensus sebelumnya referensi waktu dalam konsep kependudukan adalah enam bulan. Namun, SP2020 menggunakan referensi waktu 12 bulan. Perubahan ini didasari oleh:

#MENCATATINDONESIA

- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 15: penduduk yang sudah pindah minimal 1 (satu) tahun wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di daerah.
- System of National Account (SNA): Penduduk adalah mereka yang telah menetap dan berniat menetap minimal 1 tahun di wilayah Indonesia.
- United Nations Statistics Division (UNSD) merekomendasikan agar negara-negara menerapkan batasan 12 bulan untuk tempat biasa tinggal.

2

KONSEP RUMAH TANGGA DAN KELUARGA

- Pada sensus penduduk sebelumnya, unit pencacahan yang digunakan untuk menghitung jumlah penduduk menggunakan pendekatan rumah tangga, sedangkan SP2020 menggunakan pendekatan keluarga.
- Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau bangunan sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.
- Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar pada kartu keluarga (KK).

3

WILAYAH KERJA STATISTIK

- Wilayah kerja statistik (wilkerstat) adalah wilayah kerja untuk kegiatan sensus dan survei yang diselenggarakan oleh BPS. Wilkerstat terdiri dari wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan blok sensus, ditambah dengan informasi satuan lingkungan setempat.
- Pada sensus penduduk sebelumnya, wilkerstat terkecil yang digunakan adalah blok sensus. Blok sensus memiliki muatan yang hampir seragam atau sekitar 80 rumah tangga. Blok sensus menjadi bagian dari kerangka sampel pada survei-survei yang dilakukan BPS.
- Wilkerstat yang digunakan pada pelaksanaan SP2020 adalah berdasarkan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) seperti RT/jorong/banjar/dusun dan lain sebagainya dengan muatan yang sangat beragam. Untuk kedepannya, BPS akan melakukan penyesuaian terhadap

TANTANGAN PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK 2020

Tantangan

Pandemi Covid-19

- Anjuran pemerintah untuk *physical distancing*.
- Penetapan wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
- Tidak diketahui kapan berakhirnya



Refocusing Anggaran (Perpres No. 54 Tahun (2020)

Penyesuaian Anggaran SP2020

- 4,034 triliun menjadi 1,102 triliun
- USD 1,03/capita menjadi 0,26/capita *USD 1 = IDR 14.500,-

Penetapan Covid-19 sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) menjadi tantangan berat pada pelaksanaan SP2020. Kebijakan pemerintah berfokus penanganan pandemi tersebut dengan pembatasan pertemuan tatap muka dan pengalihan anggaran untuk pemulihan ekonomi. Anggaran SP2020 mengalami pemotongan sebesar 74 persen karena dialihkan untuk pemulihan ekonomi. Semula SP2020 memiliki anggaran atau Rp4.034,49 miliar, namun pada pelaksanaan SP2020 anggaran tersebut dipotong menjadi sebesar Rp1.102 miliar. Sehingga, anggaran SP2020 per kapita sebesar USD 0,26 (sebelumnya USD 1,03).

Perubahan Struktur Anggaran pasca Perpres 54/2020 berimplikasi pada:

- ▶ **Penyesuaian Tata Kelola SP2020, dan**
- ▶ **Penyesuaian Output SP2020**

Perubahan struktur anggaran tersebut mendorong BPS melakukan penyesuaian pada setiap tahapan proses bisnis dan output dengan tetap berpegang pada tujuan besar SP2020.



**BERPENGARUH
TERHADAP
KUALITAS DATA**

SENSUS PENDUDUK 2020 DI MASA PANDEMI

Pandemi Covid-19 menghadapkan semua pihak pada situasi ketidakpastian yang tinggi, namun BPS harus memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan sensus penduduk. Selain Indonesia, sebanyak 13 negara melaksanakan sensus penduduk sesuai jadwal atau menggunakan sensus register-based. Sebaliknya, sebanyak 31 negara menunda atau memperpanjang periode sensus.

RENCANA AWAL

PENYESUAIAN

DAMPAK

SENSUS PENDUDUK ONLINE

15 Februari - 31 Maret 2020

15 Februari - 29 Mei 2020

Jumlah Penduduk Respon 51,36 juta penduduk (13,05%)

PENCACAHAN LAPANGAN

Periode: **Juli 2020**

Wawancara di semua wilayah:

- CAPI
- PAPI

Jumlah Petugas: +/- **400.000**

Pelatihan petugas tatap muka

Persyaratan dan Kelengkapan petugas: **Rompi, tas, dan ATK**

Periode: **September 2020**

Pembagian wilayah menjadi 3 zona:

- Zona 1: (227 kab/kota)
Ground check +Dopu
- Zona 2: (246 kab/kota)
Ground check
- Zona 3: (41 kab/kota)
Ground check+wawancara

Jumlah petugas : +/- **208.000**

Pelatihan jarak jauh online dan mandiri

Rompi,tas dan ATK+Alat pelindung diri (**masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer dan rapid test**)

Variabel yang dihasilkan di Zona 2 sangat terbatas > Tantangan pada diseminasi data

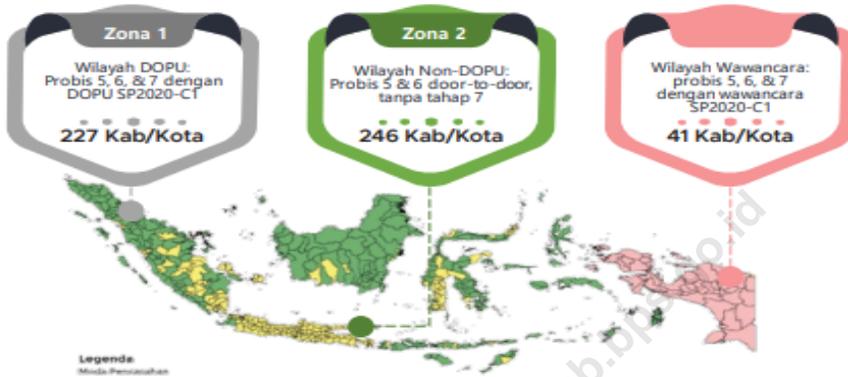
Beban petugas bertambah

Pemahaman petugas bervariasi

Relokasi Anggaran

#MENCATATINDONESIA

PEMBAGIAN ZONA PENDATAAN SP2020 SEPTEMBER



2

Sensus Penduduk Online Musi Banyuasin

SP Online sebagai upaya menjangkau masyarakat yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam SP2020

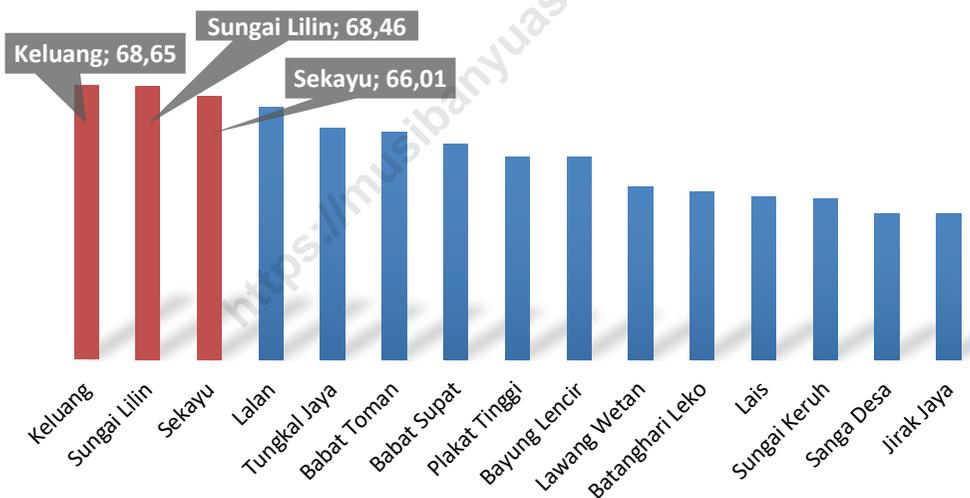
Masyarakat mengisi SP Online melalui website sensus.bps.go.id



STRATEGI PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK ONLINE KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SP Online dirancang untuk memberikan pilihan kepada penduduk Indonesia agar dapat berpartisipasi secara mandiri dalam sensus penduduk. Selain itu, SP Online merupakan salah satu upaya untuk menjangkau penduduk yang sulit ditemui petugas sensus, seperti penduduk yang bekerja dengan jam kerja tertentu, daerah elit, dan lain-lain.

Setelah berlangsung selama hampir 3,5 bulan, pada tanggal 29 Mei 2020 SP Online dinyatakan berakhir dengan hasil yang cukup menggembirakan. Sebanyak 400.587 data penduduk Kabupaten Musi Banyuasin atau setara dengan 60,88% keluarga telah terekam dalam SP Online. Di Provinsi Sumatera Selatan sendiri, Kabupaten Musi Banyuasin berhasil menempati urutan ketiga respon rate SP Online paling banyak dibanding kabupaten/kota lainnya.



Berdasarkan kecamatan, *respon rate* SP Online paling tinggi terjadi di Kecamatan Keluang. Sebanyak 68,65 persen rumah tangga di Kecamatan Keluang berpartisipasi dalam pengisian SP Online. Kecamatan Sungai Lilin dan Sekayu juga memiliki *respon rate* di atas 65 persen. Sedangkan tiga kecamatan dengan *respon rate* SP Online paling rendah adalah Kecamatan Jirak Jaya, Sanga Desa dan Sungai Keruh.

Untuk memperoleh capaian tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, terutama di tengah pandemi dan keterbatasan lainnya. Berbagai strategi dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengisian SP Online, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan dukungan dengan *stakeholder* kunci

- Bupati Kabupaten Musi Banyuasin : Surat Edaran untuk Camat, Kepala Desa dan Lurah
 - Disdikbud Kabupaten Musi Banyuasin: SP2020 sebagai tugas sekolah siswa/i SD,SMP dan SMA/SMK
 - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin : SP2020 sebagai tugas sekolah siswa/i MI, MTS dan MA
2. Melakukan pendekatan kepada Ketua/Pengurus SLS agar menghimbau warga berpartisipasi dalam SP Online.
 3. Melakukan kontroling pengisian SP Online terhadap seluruh pegawai negeri sipil di seluruh dinas Kabupaten Musi Banyuasin.
 4. Merekrut duta sensus
 5. Menarik dukungan penduduk yang memiliki pengaruh untuk mengajak masyarakat melakukan sensus.
 6. Mengadakan pendampingan pengisian SP Online di beberapa dinas dan di kantor BPS Kabupaten Musi Banyuasin
 7. Mengoptimalkan peran seluruh pegawai BPS Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan *re-post* di akun media sosial pribadi pegawai atau mengirim ke *Whatsapp Group* yang dimiliki.
 8. Menarik antusiasme masyarakat dengan memberikan souvenir kepada mereka yang telah melaksanakan pengisian SP Online.

SP Online memberikan keyakinan bahwa sensus penduduk secara mandiri dapat dilakukan di Indonesia di masa yang akan datang. Selanjutnya, SP Online diharapkan tidak hanya digunakan pada SP2020. Kedepannya, SP Online diharapkan dapat digunakan sebagai moda pemutakhiran data kependudukan melalui peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait. Moda ini memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dan mandiri serta lebih peduli pada data pribadi. Jika catatan peristiwa penting kependudukan dapat diperoleh secara *real time* maka kualitas data kependudukan akan dapat terus ditingkatkan. Sehingga data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan terkini akan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan anggaran, parameter untuk menentukan kebijakan, dan eksekusi program pembangunan yang lebih baik.



Penduduk Musi Banyuasin Hasil Sensus Penduduk 2020

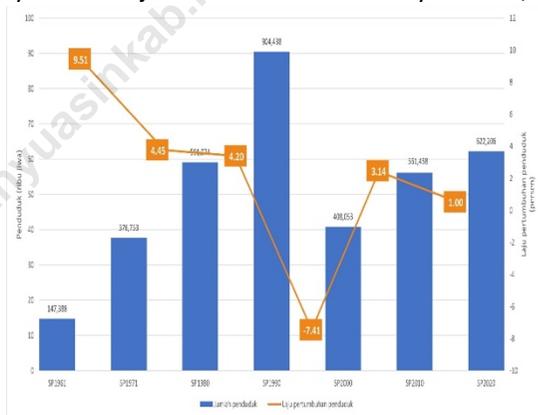
3

Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada September 2020 sebanyak 622.206 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,00 persen per tahun

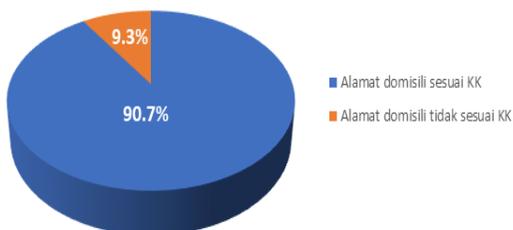
JUMLAH PENDUDUK MUSI BANYUASIN

Jumlah penduduk Musi Banyuasin sebanyak **622.206 jiwa**

SP2020 mencatat penduduk Musi Banyuasin pada bulan September 2020 sebanyak 622.206 jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk Musi Banyuasin mengalami pergerakan yang berfluktuasi. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 60.748 jiwa atau rata-rata sebanyak 6.074,8 jiwa setiap tahun. Dalam kurun waktu 2010-2020, laju pertumbuhan penduduk Musi Banyuasin sebesar 1,00 persen poin per tahun. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,14 persen jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 sebesar 3,14 persen.



Persentase penduduk berdasarkan kesesuaian alamat domisili dan KK



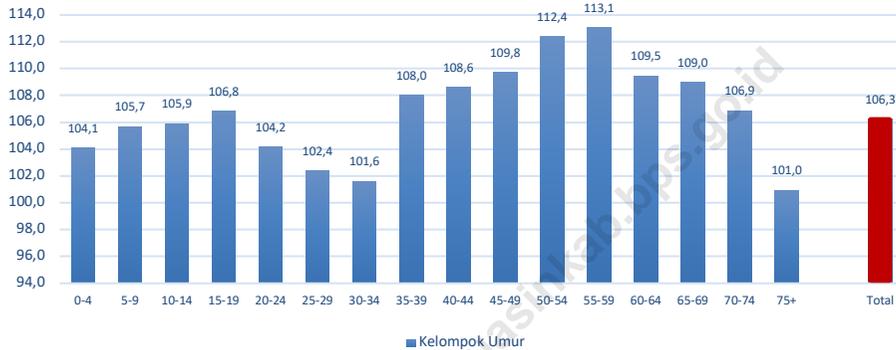
SP2020 mencatat sebesar 90,70 persen atau sekitar 564.359 penduduk berdomisili sesuai Kartu Keluarga (KK^{*}). Sementara 9,30 persen atau sekitar 57.847 penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK. Jumlah ini mengindikasikan banyaknya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tercatat pada Kartu Keluarga (KK).

*) Perbedaan domisili di level SLS

RASIO JENIS KELAMIN

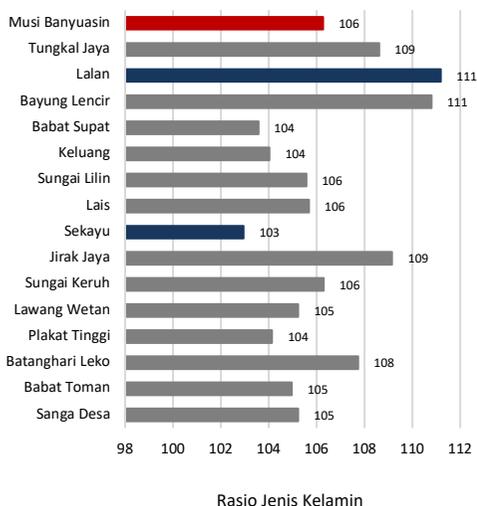
Laki-laki masih lebih banyak daripada perempuan

Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur, 2020



SP2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Musi Banyuasin sebanyak 320.561 orang, atau 51,52 persen dari penduduk Musi Banyuasin. Sementara, jumlah penduduk perempuan di Musi Banyuasin sebanyak 301.645 orang, atau 48,48 persen dari penduduk Musi Banyuasin. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Musi Banyuasin sebesar 106,3, yang artinya terdapat 106 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Musi Banyuasin pada tahun 2020.

Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan, 2020



Menurut kelompok umur, rasio jenis kelamin tertinggi pada kelompok umur 55-59 tahun sebesar 113,1 dan terendah pada kelompok umur 75 tahun ke atas, yaitu sebesar 101. Rasio jenis kelamin sebesar 101 mengindikasikan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih sedikit daripada laki-laki pada kelompok umur 75 tahun ke atas.

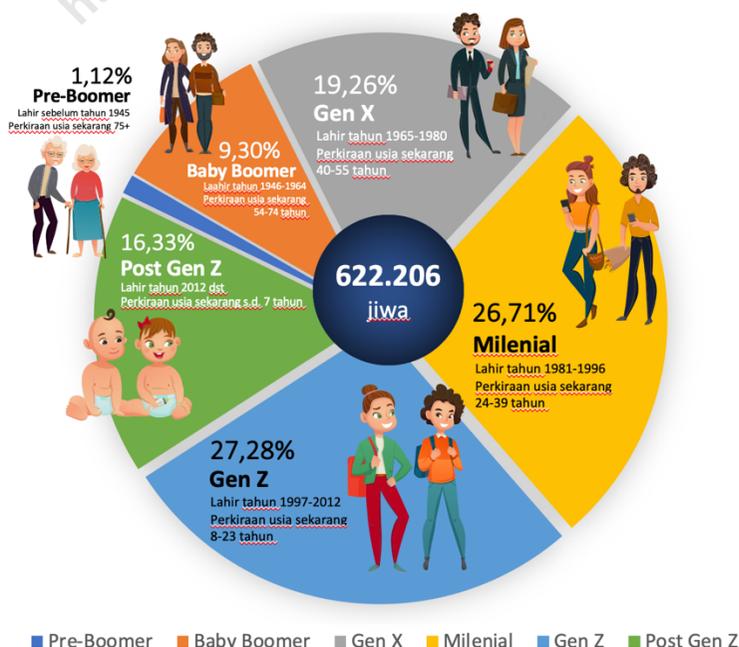
Hasil SP2020 menunjukkan rasio jenis kelamin di level kecamatan secara umum selaras dengan level kabupaten Musi Banyuasin, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kecamatan dengan rasio jenis kelamin tertinggi adalah Lalan, sedangkan yang terendah adalah Sekayu.

BONUS DEMOGRAFI

Generasi Z Bersama Milenial Akan Menjadi Aktor untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Musi Banyuasin didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial. Proporsi Generasi Z sebanyak 27,28 persen dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 26,71 persen dari total populasi Musi Banyuasin. Kedua generasi ini termasuk dalam usia Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Sekitar tujuh tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Musi Banyuasin, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Musi Banyuasin.

Komposisi Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin, 2020



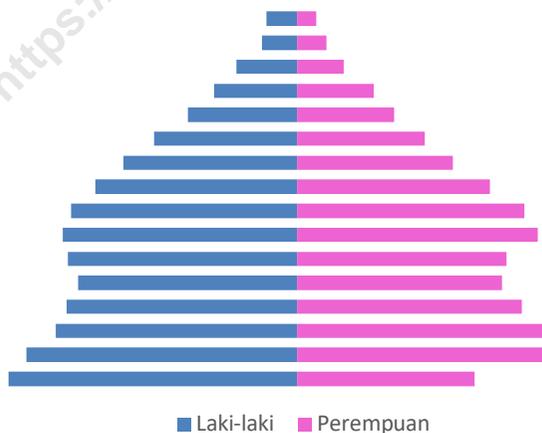
KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM BONUS DEMOGRAFI

Kabupaten Musi Banyuasin masih dalam masa bonus demografi

Hasil SP2020 bahwa persentase penduduk Musi Banyuasin yang masuk kategori usia non produktif adalah sebesar 31,20 persen, sedangkan persentase penduduk Musi Banyuasin yang masuk kategori usia produktif adalah sebesar 68,80 persen sehingga rasio ketergantungan Musi Banyuasin adalah sebesar 45,34. Artinya adalah setiap 100 orang di Musi Banyuasin yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Hal ini menandakan bahwa Musi Banyuasin sekarang masih dalam masa bonus demografi. Kondisi ini merupakan peluang dan tantangan bagi Musi Banyuasin, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Musi Banyuasin.

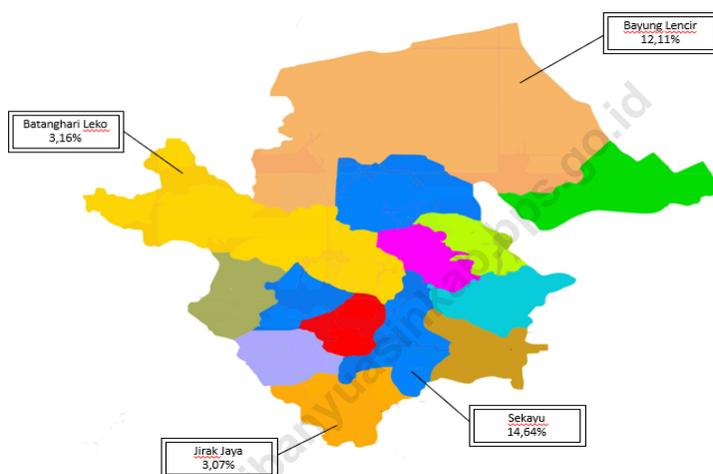
Piramida Penduduk Musi Banyuasin, 2020



Oleh karena itu, pemerintah perlu mulai mempersiapkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kondisi kependudukan di Musi Banyuasin tersebut. Jika penduduk usia produktif tersebut memiliki kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang memadai, serta dapat terus berkontribusi dalam perekonomian, maka kelompok penduduk tersebut berpeluang membuka jendela kesempatan untuk Musi Banyuasin dalam memperoleh kondisi perekonomian yang lebih baik lagi.

SEBARAN PENDUDUK MUSI BANYUASIN

Penduduk Musi Banyuasin terkonsentrasi di Kecamatan Sekayu



Dengan luas daratan Musi Banyuasin sebesar 14.266 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Musi Banyuasin sebanyak 43 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2010 yang mencatat kepadatan penduduk Musi Banyuasin sebanyak 39 jiwa per kilometer persegi dan hasil SP2000 yang mencapai 43 jiwa per kilometer persegi.

Sebaran penduduk Musi Banyuasin masih terkonsentrasi di Kecamatan Sekayu. Meskipun luas geografisnya hanya sekitar empat persen dari seluruh wilayah Musi Banyuasin, Kecamatan Sekayu dihuni oleh 91.117 penduduk atau 14,64 persen penduduk Musi Banyuasin. Sebaran penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan Bayung Lencir dengan jumlah penduduk sebanyak 75.368 orang, yaitu sebesar 12,11 persen. Sementara sebaran penduduk terkecil adalah Batanghari Leko dan Jirak Jaya yang jumlah penduduk masing-masing sebanyak 19.670 dan 19.086 penduduk, atau sebesar 3,16 dan 3,07 persen dari total penduduk Musi Banyuasin.



LONG FORM

- Sebagai rangkaian pelaksanaan SP2020, di tahun 2021 akan dilanjutkan dengan pendataan *long form* secara sampel.
- Pendataan ini akan dilaksanakan pada September 2020.
- Tujuan dari pendataan *long form* ini adalah untuk mengumpulkan data-data terkait parameter demografi (kelahiran, migrasi, dan kematian), pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan, perumahan, dan informasi penting lainnya untuk menghasilkan indikator SDG's dan RPJMN khususnya bidang kependudukan.

LAMPIRAN



Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin menurut Kecamatan, 2020 (jiwa)

Kecamatan	Jenis Kelamin		Laki-Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sanga Desa	16.927	16.085	33.012	105,23
Babat Toman	18.471	17.597	36.068	104,97
Batanghari Leko	10.201	9.469	19.670	107,73
Plakat Tinggi	13.643	13.100	26.743	104,15
Lawang Wetan	12.861	12.221	25.082	105,24
Sungai Keruh	12.032	11.319	23.351	106,30
Jirak Jaya	9.961	9.125	19.086	109,16
Sekayu	46.220	44.897	91.117	102,95
Lais	27.466	25.990	53.456	105,68
Sungai Lilin	31.745	30.072	61.817	105,56
Keluang	16.691	16.044	32.735	104,03
Babat Supat	18.183	17.557	35.740	103,57
Bayung Lencir	39.614	35.754	75.368	110,80
Lalan	20.690	18.608	39.298	111,19
Tungkal Jaya	25.856	23.807	49.663	108,61
Total	320.561	301.645	622.206	106,27

#MENCATATINDONESIA

Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin menurut Kecamatan, 2020 (jiwa)

Kecamatan	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
(1)	(2)	(3)
Sanga Desa	104,14	0,92
Babat Toman	27,94	2,23
Batanghari Leko	9,33	-0,70
Plakat Tinggi	108,27	1,89
Lawang Wetan	108,11	0,46
Sungai Keruh	70,73	0,43
Jirak Jaya	63,86	0,43
Sekayu	129,87	1,44
Lais	70,75	0,20
Sungai Lilin	165,17	1,54
Keluang	81,72	1,40
Babat Supat	69,94	0,79
Bayung Lencir	15,55	0,46
Lalan	38,12	0,42
Tungkal Jaya	60,48	2,02
Total	43,61	1,00

Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020 (jiwa)

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Laki- laki+Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	33.349	32.027	65.376
5-9	31.238	29.551	60.789
10-14	27.837	26.276	54.113
15-19	26.586	24.883	51.469
20-24	25.260	24.237	49.497
25-29	26.479	25.857	52.336
30-34	27.071	26.633	53.704
35-39	26.105	24.161	50.266
40-44	23.309	21.456	44.765
45-49	20.022	18.241	38.263
50-54	16.543	14.721	31.264
55-59	12.633	11.173	23.806
60-64	9.589	8.760	18.349
65-69	6.961	6.387	13.348
70-74	4.074	3.811	7.885
75+	3.505	3.471	6.976
Total	320.561	301.645	622.206

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Jl. Merdeka Lk.1 Sekayu
Telepon: (0711)321023 Email : bps1606@bps.go.id
Homepage: <http://musibanyuasinkab.bps.go.id>

ISBN 978-623-6777-13-8

